

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang pengembangan otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan keuangan daerah membawa perubahan terhadap pembagian tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya.

Setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak dan juga wewenang untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli daerah mencerminkan kemandirian daerah, maka ketika pendapatan daerah semakin besar, berarti daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah tidak begitu ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arsyad dalam Azzumar, 2011).

PAD merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan daerah. Selain itu PAD itu sendiri merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu komponen penting penerimaan keuangan daerah selain dari hasil pajak dan bukan pajak. Besarnya pendapatan asli daerah yang didapat suatu daerah menunjukkan derajat indikasi kemandirian suatu daerah. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan juga bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan daerah sendiri dengan didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggara-nya otonomi daerah yang semakin baik, maka usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri adalah dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola hasil penerimaan yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah, melakukan tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya. Setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002).

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya, dimana kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari Kota Tasikmalaya sejak tahun 2011 yang memiliki pendapatan asli daerah dari berbagai sumber. Hal ini sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)

NO	Jenis Penerimaan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan	1.227	1.309	1.505	813.389
	Pendapatan Asli Daerah	49.657	48.338	51.160	60.970
	Pajak Daerah	11.851	12.008	17.861	20.545
	Retribusi daerah	14.216	14.311	15.312	19.820
	Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	10.545	13.750	8.042	12.607
	Lain-lain pendapatan yang sah	13.045	8.186	9.944	1.281
2	Dana Perimbangan	948.170	1.058.189	1.043	91.466
	Dana bagi hasil	68.921	76.259.	85.602	1.083
	Dana Alokasi Umum	801.713	921.384	881.513	106.110
	Dana Alokasi Khusus	77.536	60.545	76.857	47.181
3	Lain-lain pendapatan yang sah	229.250	203.000	410.351	-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya (Data Diolah)

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuatif. Terlihat dari tahun 2009-2011 penerimaan daerah mengalami kenaikan. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya dana perimbangan dan upaya pemerintah daerah dari tahun 2009. Namun pada tahun 2012 pendapatan keseluruhan mengalami penurunan sebesar 813.389 sedangkan pendapatan asli daerah naik sedikit menjadi sebesar 60.970. bahkan dana perimbangan juga menurun drastis pada tahun tersebut sebesar 91.446. Hal ini disebabkan karena PAD tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dari tabel 1.1 tersebut juga dapat dilihat bahwa peran PAD memang sangat begitu besar terhadap penerimaan pemerintah. Adapun komponen penerimaan daerah yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan penerimaan daerah ini didukung oleh kenaikan penerimaan dari komponen pajak daerah, kemudian yang kedua dari komponen retribusi daerah, dan yang terakhir dari komponen hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan daerah maka pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan seperti perpajakan. Karena pendapatan asli daerah bukan hanya mengandalkan dari sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber pendapatannya. PAD merupakan sumber pendapatan yang sangat penting

bagi daerah. Untuk itu daerah mempunyai kewenangan dalam memanfaatkan PAD sesuai kebutuhan daerahnya.

Banyak hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah mengindikasikan bahwa sumber utama biaya pemerintah daerah untuk bisa menjalankan pembangunan daerah dapat terlihat dari pertumbuhan ekonominya. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut sangat baik maka kemungkinan daerah tersebut memiliki Pendapatan daerah yang memadai sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Faktor lain yang juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Jumlah Penduduk. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah penduduk di daerah tersebut dapat meningkatkan dibukanya banyak lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang baru sehingga akan menyumbang kenaikan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kurs mata uang asing juga mempengaruhi pendapatan asli daerah baik itu keunggulan daerah, kekayaan alam, maupun hasil-hasil daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sehingga naik turunnya kurs mata uang asing khususnya dollar sangat mempengaruhi

realisasi pendapatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1985-2015 Dengan Pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM)**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu analisis faktor-faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 1986-2015. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, variabel independen yang digunakan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Kurs. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sedangkan, untuk metode analisis data menggunakan VECM (*Vector Error Correction Model*) dengan bantuan perangkat lunak Eviews versi 7.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas telah diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Maka rumusan permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh Kurs Mata Uang Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk menganalisis pengaruh Kurs Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Agar memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang faktor-faktor penerimaan daerah khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pembuat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dalam mendorong perekonomian daerahnya sendiri agar tercapai kesejahteraan di daerah tersebut.